

121

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AUGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 13

TAHUN 2008

Penjualan Antam Turun Lima Persen

Jakarta-Penjualan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kuartal II (April-Mei-Juni) 2008 turun lima persen dibanding periode yang sama tahun 2007. Tahun ini, penjualan Antam tercatat Rp 3,230 triliun, sedangkan tahun sebelumnya Rp 3,384 triliun.

Sekretaris Perusahaan Bimo Budi Satrio dalam siaran pers yang diterima redaksi, Senin (4/8), memaparkan penurunan terbesar terjadi pada penjualan bijih nikel. Pada kuartal II ini, penjualan bijih nikel turun sebesar 17 persen menjadi 1,66 juta *wet metric ton* (wmt).

"Namun, aktivitas *trading* yang tinggi dari logam mulia pada kuartal II ini turut mendorong peningkatan penjualan emas sebesar 423 persen menjadi 1.982 kg," kata Bimo.

Selain penjualan, produksi Antam juga mengalami banyak penurunan. Produksi feronikel turun sebesar 6 persen menjadi 4.152 ton nikel dalam feronikel (tni) dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu.

Kemudian, ada bijih emas yang penjualannya turun 16

persen bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, menjadi 577 kg. Menurut Bimo, hal ini disebabkan penurunan kadar dan produksi bijih emas.

Yang terakhir, penurunan produksi juga terjadi untuk bijih nikel yang tercatat turun enam persen menjadi 1,91 juta wmt pada kuartal II tahun 2008 ini.

Bimo juga menjelaskan beberapa aksi korporasi yang telah dilakukan Antam pada kuartal II tahun 2008 ini.

Ada tiga penandatanganan *Joint Venture Agreement* yang akan dilakukan Antam. Pertama, dengan Krakatau Steel untuk mengembangkan industri baja di Kalimantan Selatan. Kedua, dengan Jindal untuk mengembangkan fasilitas *smelter* nikel dan *stainless steel*. Ketiga, dengan BHP Billiton untuk mengembangkan deposit nikel di Indonesia Timur.

Aksi korporasi lainnya ada Rapat Umum Pemegang Saham Antam yang memutuskan untuk mendistribusikan dividen tunai sebesar Rp 215,23 per saham. (cr-2)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 11

TAHUN 2008

Triwira Akan Akuisisi Perusahaan Tambang Batubara Rp 100 Miliar

Oleh Eva Fitriani

▶ JAKARTA – PT Triwira Insan Lestari Tbk (TRIL) berencana mengakuisisi perusahaan tambang batubara senilai Rp 100 miliar tahun depan. Perseroan tengah mengincar tiga sampai empat perusahaan batubara di Kalimantan.

“Kami sudah menjajaki perusahaan batubara untuk diakuisisi meski proses akuisisi sendiri kemungkinan baru terealisasi tahun depan. Kami sedang menjajaki akuisisi tiga sampai empat perusahaan,” ujar Direktur Triwira Rudy Widjaja kepada *Investor Daily* di Jakarta,

bara dan menjamin ketersediaan batubara untuk perusahaan. Pihaknya mengincar perusahaan batubara yang memiliki lahan luas tetapi kekurangan modal pengembangan.

Perseroan akan menyelenggarakan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUP



Senin (4/8).

Dia menjelaskan, perseroan bertujuan mengembangkan bisnis sektor batu-

SLB) untuk meminta persetujuan pemegang saham tentang penambahan bisnis penjualan batubara. “Kam



berniat menggelar RUPSLB pada Oktober 2008 guna

5 Agustus 2008 : Rp 1.000



membahas rencana tersebut," tambah Rudy.

Triwira merupakan perusahaan yang bergerak di bidang suplai kebutuhan teknis, *safety equipment*, dan *automotive equipment*.

Rudy melanjutkan, pihaknya akan mengawali bisnis batubara dalam skala kecil dan bersifat *trading* untuk tahun ini. Perseroan menganggarkan dana awal sekitar Rp 20 miliar untuk bisnis batubara tahun ini. Diharapkan akhir 2008, bisnis baru tersebut bisa menyumbang sekitar 10% terhadap total pendapatan Triwira.

Dia mengatakan, perseroan berniat memperbesar bisnis batubara tahun depan. Tingginya permintaan batubara diharapkan memacu kinerja keuangannya Triwira ke depan. Pengem-

banan bisnis batubara lebih besar tahun 2009 diproyeksikan menelan dana investasi Rp 100 miliar.

Kebutuhan investasi tersebut akan didanai kas internal dan eksternal. Menurut dia, perseroan tetap mempertahankan bisnis inti penjualan onderdil kendaraan. Bahkan, perusahaan menganggarkan dana sekitar Rp 100 miliar untuk investasi onderdil tahun ini. Pendanaannya berasal dari kas internal.

Tumbuh 50%

Rudy mengatakan, diversi-

fikasi bisnis batubara ditambah dengan penjualan onderdil diharapkan mampu mendongkrak kinerja keuangan perusahaan hingga 50% tahun depan.

"Dengan adanya diversifikasi bisnis batubara serta pertumbuhan di bisnis inti, diharapkan pendapatan dan laba bersih terdongkrak hingga 50% pada tahun depan," ujarnya.

Triwira menargetkan pendapatan tahun 2008 mencapai Rp 177 miliar dengan laba bersih Rp 41,3 miliar. Sepanjang semester I-2008, perusahaan membukukan penjualan bersih sebesar Rp 51,72 miliar naik tipis dibanding periode yang sama 2007 Rp 51,48 miliar. Laba usaha naik menjadi Rp 15,27 miliar dibanding semester I-2007 sebesar Rp 14,51 miliar.

Perseroan berhasil mencatat laba bersih semester I-2008 senilai Rp 11,29 miliar naik dibandingkan semester yang sama tahun lalu sebesar Rp 9,49 miliar. Pertumbuhan laba bersih didukung kenaikan laba usaha dan perolehan penghasilan lain-lain sebesar Rp 833,95 juta.

Pada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia kemarin, saham berkode TRIL ditutup melemah Rp 10 menjadi Rp 1.000 per saham. Jumlah saham berpindah tangan mencapai 996,5 ribu saham dengan nilai transaksi Rp 980,77 juta.

HUBUNGAN MASYARAKAT
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 20

TAHUN 2008

Neyveli dan NTPC Incar Batubara RI

CHENNAI – Perusahaan asal India, Neyveli Lignite Corp Ltd (NLC), menyiapkan dana sedikitnya US\$ 452,4 juta atau sekitar Rp 4,1 triliun untuk membeli batubara dari Indonesia dan tambang batubara lokal, Mahanadi. Chairman dan Direktur Pengelola NLC JN Prasanna Kumar seperti dikutip situs *The Economic Times* di Chennai, India, Selasa (5/8), mengatakan, batubara tersebut dibutuhkan untuk memasok PLTU berkapasitas 1.000 megawatt (MW) di Tuticorin. Pengembangan proyek ini merupakan kerja bareng NLC dan Tamil Nadu Electricity Board (TNEB). "Secara teknis, penawaran harga akan dibuka dalam tempo 10-15 hari ini," ujar Kumar. Sementara itu, National Thermal Power Corporation (NTPC) juga dalam waktu dekat akan mengakuisisi perusahaan tambang batubara di Indonesia. Sayangnya, tidak disebutkan perusahaan batubara mana yang akan diakuisisi pabrik setrum pelat merah India itu. (dr)

HUBUNGAN MASYARAKAT
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 20

TAHUN 2008

Cadangan Batubara Jembayan Naik 203%

SINGAPURA – Manajemen Straits Asia Resources Limited mengumumkan bahwa cadangan terindikasi (*indicated resources*) batubara di tambang Jembayan, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur naik 203% dari 45,5 juta ton menjadi 138 juta ton. CEO Straits Asia Rihard Ong dalam laporan keterbukaannya kepada Bursa Singapura, Selasa (5/8), menyatakan, pihaknya merasa gembira atas pengeboran dengan hasil yang menggembirakan. Dia memperkirakan target produksi batubara dari tambang ini mencapai 11 juta ton per tahun bisa terealisasi pada 2010. Straits Asia mengakuisi 100% tambang batubara Jembayan senilai US\$ 350 juta, awal November 2007. Nilai akuisisi sebesar itu dalam bentuk tunai sebesar US\$ 275 juta. Sisanya US\$ 75,09 juta dalam bentuk kepemilikan saham di Straits Asia sebesar 6,9%. Pemilik tambang Jembayan adalah Vital Century Investment, Pacific Communication Corp, dan Mitsui Matsushima International Pty Ltd. Tahun lalu, tambang yang mulai berproduksi sejak 2004 itu mencapai lima juta ton. (dr)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 20

TAHUN 2008

PRESEDEN BURUK BAGI INVESTOR ASING

Pengusaha Batubara Protes Pencekalan

Oleh Heriyono dan Dudi Rahman

► JAKARTA – Pengusaha pertambangan batubara memprotes kebijakan pemerintah yang mencekal 14 petinggi perusahaan batubara nasional. Langkah represif tersebut menjadi salah satu bukti kepanikan pemerintah dan ketidaktahuan atas akar permasalahan.

Beberapa Perusahaan Batubara yang Berutang kepada Negara

No	Nama Perusahaan	Lokasi Tambang	Target Produksi Tahun 2008	Besar Piutang Negara
1	PT Arutmin Indonesia	Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel	20,30 juta ton	US\$ 75,4 juta
2	PT Kaltim Prima Coal	Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Kaltim	46,27 juta ton	US\$ 127,1 juta
3	PT Adaro Indonesia	Kabupaten Tabalong dan Balangan, Kalsel	38 juta ton	US\$ 238,3 juta
4	PT Berau Coal	Berau, Kaltim	15 juta ton	US\$ 26 juta dan Rp 312 miliar

Sumber: Depkeu

Di sisi lain, kebijakan tersebut menjadi preseden buruk bagi investor asing yang akan berinvestasi di Indonesia. Investor asing akan melihat iklim investasi di Tanah Air tidak kondusif dan tidak berpihak kepada dunia usaha.

Demikian diutarakan Direktur Utama PT Berau Coal Bob Kamandanu, mantan Direktur Keuangan PT Arutmin Indonesia Eddie Junianto Soebari, dan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Batubara Indonesia (APBI) Jeffrey Mulyono kepada *Investor Daily* di Jakarta, Selasa (5/8).

Mereka dihubungi secara terpisah menanggapi langkah Dirjen Imigrasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mencekal 14 pimpinan perusahaan tambang batubara selama enam bulan sejak 1 Agustus 2008 hingga Januari 2009.

Mereka yang dicekal adalah direksi dan komisaris PT Arutmin Indonesia, yaitu Kazuya Tanaka, Endang Ruchiyat, Ferry Purbaya Wahyu, Eddie Junianto Soebari, dan Roslan Perkasa Roslani (komisaris).

Selain itu, lima orang direksi dan komisaris PT Kaltim Prima Coal. Mereka adalah Ari Saptari Hudaya, Kenneth Patrick Farrel (warga Australia), Hanibal S Anwar, Abdullah Popo Parulian (komisaris), serta Nalinkant Amratlath Rathod (preskom).

Sementara itu, dari PT Adaro Indonesia hanya Komisaris Utama Edwin Soerjadjaja yang



■ Edwin Soerjadjaja

dicekal dan PT Berau Coal yang dicekal mantan presdirnya, yaitu Jeffrey Mulyono. Dari PT Libra Utama Intiwood yang dicekal *personal guarantee*, yakni Mualin Tantomo dan Hendra Tjoa, dirut PT Citra Dwipa Finance

Para petinggi perusahaan pertambangan itu diduga terlibat dalam perkara utang piutang dengan negara sehingga dicegah selama enam bulan. Dasar permohonan pencegahan itu adalah UU Nomor 46 tahun 1960 tentang Urusan Piutang Negara dan Kepmenkeu No 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara.

Lex Specialist

Eddie Soebari mengaku, belum mengetahui pencekalan tersebut. Hingga kemarin, Eddie belum menerima surat pemberitahuan pencekalan dari imigrasi. "Namun, saya

tegaskan bahwa tidak benar bila kami memiliki piutang kepada negara hingga US\$ 75,4 juta," tegas Eddie.

Jeffrey Mulyono mengungkapkan, pencekalan terhadap dirinya salah alamat. Dia mengaku telah mundur dari Berau Coal sejak 2006 dan kini menjadi konsultan pertambangan. "Saya mendapatkan surat pencekalan itu sejak Sabtu (2/8) lalu. Tadi (kemarin) siang saya sudah kirim surat klarifikasi," katanya.

Jeffrey dicekal sebagai presidir Berau Coal karena piutang negara di DESDM senilai Rp 312 miliar dan US\$ 26 juta. Sementara itu, versi Jeffrey menyebutkan, tuduhan piutangnya dalam surat yang diajukan padanya sekitar Rp 312 miliar. "Tapi tidak disebutkan kapan waktunya," katanya.

Menurut Bob Kamandanu, persoalan piutang tersebut bermula saat pemerintah tidak juga mengganti pajak pertambahan nilai (PPN) yang dibayarkan perusahaan batubara. Menurut ketentuan, PPN yang dibayarkan perusahaan batubara memang diganti pemerintah karena sudah termasuk dalam royalti yang dibayarkan.

Namun, Depkeu yang punya utang untuk mengembalikan utang kepada perusahaan batubara. Lantaran tidak dibayar, menurut Bob, sejumlah perusahaan yang memperoleh izin perjanjian karya pengusahaan batubara (PKP2B) generasi pertama, termasuk Berau Coal, menahan sebagian pendapatan

negara bukan pajak (PNBP) karena bersifat *lex specialist*. "Ini sudah diajukan ke PTUN. Hasilnya putusan sela. Dengan putusan itu, tidak boleh ada keputusan apa pun dari pemerintah," jelas Bob.

Dirjen Mineral, Batubara, dan Panas Bumi (Minerbapabum) Departemen ESDM Bambang Setiawan mengungkapkan, sengketa antara perusahaan tambang batubara tersebut merupakan masalah lama.

"Pengusaha tambang berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 144 tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPn). Dalam PP tersebut, batubara termasuk barang atau komoditas yang tidak kena pajak," kata Bambang kepada *Investor Daily* di Jakarta, tadi malam.

Dirjen Kekayaan Negara Departemen Keuangan Hadiyanto menjelaskan, pencekalan dilakukan agar perusahaan batubara segera menyelesaikan urusan utang-piutangnya kepada negara. Menurut Hadiyanto, piutang tersebut sudah cukup lama dan jumlahnya mencapai Rp 3 triliun. Pencekalan terhadap 14 direksi karena dianggap sebagai pihak yang bertanggungjawab.

"Jika mereka tetap tidak menyelesaikan piutang, cekal akan diperpanjang. Sebaliknya, jika piutang diselesaikan besok, pada hari itu juga cekal akan dicabut," katanya. (ant/pya)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

TAHUN 2008

Negara Cekal 14 Bos Perusahaan Batubara

Sudah setahun lebih persoalan piutang mereka kepada negara macet

Hans Henricus B, Uji Agung Santosa, Martina Prianti

JAKARTA. Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham) mencegah dan menangkal (cekal) 14 pejabat perusahaan tambang batubara agar tak bisa ke luar Indonesia. Pencekalan itu berlaku selama enam bulan, mulai Agustus 2008 hingga 27 Januari 2009.

Direktur Penyidikan dan Peningkatan Imigrasi Ditjen Imigrasi Depkumham Syaiful Rahman mengatakan, pemicu pencekalan ini adalah surat dari Departemen Keuangan (Depkeu), yang menegaskan bahwa

mereka yang dicekal itu masih berutang pada negara. "Permintaan cekal itu untuk 11 warga Indonesia dan tiga warga asing," terang Syaiful, Selasa (5/8).

Tiga warga asing itu adalah Kazuya Tanaka, warga negara (WN) Jepang, Direktur PT Arutmin Indonesia. Kenneth Patrick Farrel, WN Australia, Direktur PT Kaltim Prima Coal, dan Nalinkant Amratlal Rathod, Presiden Komisaris KPC. (*Lihat daftar lengkap di halaman 2*).

Data Depkeu menyebutkan, pencekalan petinggi Arutmin dan KPC terkait piutang senilai US\$ 75,4 juta dan US\$ 127,1 juta. Pencekalan atas Edwin Soeryadjaja karena piutang negara

senilai Rp 144,8 miliar dan US\$ 93,5 juta. Pencekalan Jeffrey Mulyono karena piutang di Departemen ESDM senilai Rp 312 miliar dan US\$ 26 juta.

Belum ada itikad baik

Pencekalan tahap pertama ini akan diperpanjang kalau mereka tidak membayar utang kepada negara. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Depkeu Hadiyanto mengatakan, pemerintah mencekal karena selama setahun terakhir belum ada itikad baik dari para pengusaha untuk melunasi kewajibannya.

Menurut Hadiyanto, pencekalan merupakan level penagih-

an yang lebih tinggi dan memaksa. Namun ia menjanjikan, begitu utang lunas, cekal pun dicabut. "Besok lunas, langsung dicabut. Saya yang *neken*, saya yang janji," kata Hadiyanto.

Rosan Perkasa Roslani yang disebut sebagai salah Komisaris PT Arutmin Indonesia mengaku tahu pencekalan ini dari kawan. "Lagi pula sejak awal 2007, saya tidak lagi Komisaris Arutmin. Soal ada piutang apa tidak, mana saya tahu," ucap Roslan. Sedang Presiden Direktur PT Berau Coal Jeffery Mulyono tak banyak bicara. "Saya tidak bisa menjawab, lagi rapat," ucapnya.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 (6) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 2

TAHUN 2008

■ PENCEKALAN PENGUSAHA BATUBARA

Tunggakan Royalti Batubara Akibat Beleid PPN, Ekspor Batubara

JAKARTA. Urusan piutang enam perusahaan batubara kepada pemerintah sudah berlangsung lama. Namun, selama itu pula belum ada tanda-tanda para direktur dan komisaris perusahaan itu membayar utang mereka.

Departemen Keuangan (Depkeu) akhirnya melarang para direksi dan komisaris perusahaan tambang itu bepergian ke luar negeri. Pencekalan itu adalah upaya pemerintah untuk memaksa mereka membayar utang. "Langkah pencegahan ini untuk mempermudah pengurusan utang," kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto, Selasa (5/8) kemarin.

Kisruh royalti perusahaan tambang batubara ini sebenarnya telah berlangsung sejak 2001. Saat itu pemerintah memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Ekspor Batubara. Gara-gara aturan itulah enam perusahaan itu menunggak pembayaran royalti.

Catatan Depkeu per November 2007 lalu, total tunggakan royalti mencapai Rp 5,4 triliun. Rinciannya, sekitar Rp 3,8 trili-

un tunggakan royalti dari 2001 hingga 2005. Dan Rp 1,6 triliun tunggakan royalti 2006.

Menteri ESDM Purnomo Yusi-giantoro juga berupaya menyelesaikan kasus ini. Ia menyarankan Depkeu menghapus ketentuan tentang PPN Ekspor Batubara. Jika Depkeu mengikuti saran Purnomo, utang enam perusahaan itupun hilang.

Namun Depkeu menolak.

Depkeu kemudian memasukkan utang ini ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) untuk proses penagihan sebelum dilelang. "Salah satu langkah pengurusan piutang itu adalah dengan melakukan pencegahan," kata Hadiyanto.

Uji Agung Santosa

Daftar Cekal Direktorat Jenderal Imigrasi

Perusahaan	Nama	Jabatan
PT Kaltim Prima Coal	Rosan Perkasa Roeslani	Komisaris
	Abdullah Popo Parulian	Komisaris
	Rathod Nalinkant Amrattal	Presiden Komisaris
	Ari Sapta Hudaya	Presiden Direktur
	Hannibal S. Anwar	Direktur
	Kenneth Patrick Farrel	Direktur
PT Arutmin Indonesia	Endang Ruchijat	Direktur
	Ferry Purbaya Wahyu	Direktur
	Edi Junianto Subari	Direktur
	Kazuya Tanaka	Direktur
PT Adaro Indonesia	Edwin Soeryadjaya	Presiden Komisaris
PT Berau Coal	Jefferey Mulyono	Presiden Direktur
PT Citra Dwipa Fianance	Hendra Tjoa	Direktur Utama
PT Libra Utama Intiwood	Mualin Kantono	Personal Guarantoor

Sumber: Ditjen Imigrasi Departemen Hukum dan Ham

HUBUNGAN MASYARAKAT
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL **AGST** SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 **6** 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 12

TAHUN 2008

PENINDAKAN

14 Bos Batu Bara Dicekal

Pengusaha Batu Bara Dicekal

1. PT Arutmin Indonesia
 - Kazuya Tanaka (Direktur)
 - Endang Ruchijat (Direktur)
 - Ferry Purbaya Wahyu (Direktur)
 - Edi Junianto Subari (Direktur)
 - Rosan Perkasa Roeslani (Komisaris)

Masalah: Terkait piutang negara senilai US\$75,4 juta.

2. PT Kaltim Prima Coal

- Ari Saptari Hudaya (Presdir)
- Kenneth Patrick Farrel (Direktur)
- Abdullah Popo Parulian (Komisaris)
- Nalinkant Amratlal Rathod (Preskom)
- Hannibal S Anwar (Direktur)

Masalah: Terkait piutang negara senilai US\$127,1 juta.

3. PT Adaro

- Edwin Soeryadjaya (Preskom)

Masalah: Terkait piutang negara senilai Rp144,8 miliar dan US\$93,5 juta.

4. PT Berau Coal

- Jeffrey Mulyono (Presdir)

Masalah: Terkait piutang negara senilai Rp312 miliar dan US\$26 juta.

5. PT Libra Utama Intiwood

- Mualin Tantomo sebagai personal guarantor

6. PT Citra Dwipa Finance

- Hendra Tjoa (Dirut)

Sumber: Direktorat Penyidikan dan Penindakan Ditjen Imigrasi

■ TIVOK

JAKARTA (MI): Ditjen Imigrasi Departemen Hukum dan HAM mencekal 14 direksi perusahaan batu bara Indonesia karena tersangkut masalah piutang. Pencekalan yang diajukan Menteri Keuangan itu dilakukan agar perusahaan-perusahaan tersebut segera menyelesaikan urusan utang-piutangnya kepada negara. Preskom PT Adaro Indonesia Edwin Soeryadjaya masuk daftar nama direksi yang dicekal.

"Ada 14 direksi yang dicekal. Keberangkatan mereka ke luar negeri dicegah dan surat perjalanan Republik Indonesia (SPRI) mereka ditarik sementara," kata Kepala Subbagian Humas Departemen Hukum dan HAM Agato kepada *Media Indonesia* di Jakarta, kemarin.

Pencekalan itu, lanjut Agato, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M.01.IL01.02 Tahun 2001. Keputusan itu dikeluarkan pada 18 Juli 2008. Mereka terlibat perkara utang-piutang kepada negara.

Pencekalan ke luar negeri diberlakukan selama enam bulan terhitung mulai 1 Agustus 2008 sampai

27 Januari 2009.

Data Departemen ESDM menyebutkan nilai tunggakan royalti perusahaan yang merupakan pemegang kontrak perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) hingga akhir 2006 tercatat mencapai Rp5,4 triliun. Tunggakan selama kurun 2001-2005 mencapai Rp3,8 triliun dan 2006 sebesar Rp1,6 triliun.

"Piutang ini sudah diserahkan ke panitia urusan piutang negara (PUPN) setahun lebih, tapi belum ada tanda-tanda mau membayar sehingga cara penagihannya harus meningkat ke level yang lebih tinggi, lebih memaksa," kata Dirjen Kekayaan Negara Depkeu Hadiyanto, kemarin.

Mantan Presdir Berau Coal Jeffrey Mulyono yang juga Ketua Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) menilai pencekalan merupakan langkah yang berlebihan dari Depkeu. Sebab, saat ini kasus perdata antara pengusaha batu bara dan pemerintah masih dalam proses banding.

(Pia/Ant/*-X-4)

HUBUNGAN MASYARAKAT
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL **AGST** SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 (6) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 48

TAHUN 2008

Tambang Nikel PT Hoffman Disegel

PALU — Tim Reserse Kriminal Khusus (Reskrim-sus) Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah menye-gel tambang nikel milik PT Hoffman, yang beker-ja sama dengan Pan China, di Desa Ganda-Gan-da, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali.

Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Tengah Ajun Komisaris Besar Irfaisal Nasution menga-takan penyegelan akhir pekan lalu itu diikuti de-ngan pemasangan garis polisi, tujuh alat berat, tiga tongkang, dan dua *tug boat*. Kepala Satuan Reskrimsus Polda Sulawesi Tengah Ajun Komisaris Besar Fadjar Abdillah memimpin penyege-lan.

“Lokasi penambangan itu merupakan milik PT WSS sebagai pemegang hak pengusahaan hu-tan (HPH),” kata Irfaisal di Palu kemarin. Penye-gelan dilakukan setelah polisi menemukan ada-nya indikasi pencurian tanah yang diangkat se-cara besar-besaran dan dikirim menggunakan tongkang ke Cina.

Satu tongkang memuat sekitar 8.000 ton tanah mengandung nikel. Dalam sehari, diperkirakan li-ma tongkang memuat tanah dan mengopernya ke kapal yang sedang menunggu di perairan dan ti-dak terpantau oleh pengamanan laut.

Menurut Irfaisal, kasus ini masih dalam penye-lidikan kepolisian. Pihaknya juga tetap akan me-meriksa sejumlah saksi, termasuk 22 warga Cina yang ditangkap di satu hotel di Palu.

Riki, Pemimpin Perusahaan PT Hoffman, serta Lina, dari Pan China, yang berkantor di Jakarta, juga akan diperiksa. “Kedua pemimpin perusa-haan itu akan dipanggil untuk memberi kete-rangan seputar penambangan perusahaan mere-ka di Desa Ganda-Ganda,” ujar Irfaisal.

Izin penambangan PT Hoffman diperoleh pada 2005 saat Datlin Tamalagi menjabat sebagai Bupa-ti Morowali. Pemegang kuasa pertambangan yang masuk hutan, kata dia, harus mendapat izin dari Menteri Kehutanan. Bila tidak ada izin, dianggap melanggar pengelolaan hak penebangan hutan.

Pemilik HPH di kawasan tersebut, PT WSS, juga mendapat izin dari Menteri Kehutanan. Se-dangkan PT Hoffman dianggap melanggar kare-na pertambangan nikel sudah masuk kawasan hutan. ● DARLIS

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL **AGST** SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 1

TAHUN 2008

Petinggi Grup Bakrie Dicekal

Bos Adaro dan Berau Coal
juga dicekal.

JAKARTA — Direktorat Jenderal Imigrasi mencekal taipan Edwin Soeryadjaya dan para petinggi perusahaan tambang Grup Bakrie karena dinilai lalai membayar utang royalti ke negara.

"Pencekalan dilakukan atas permintaan Menteri Keuangan," ujar Direktur Penyidikan dan Penindakan Direktorat Imigrasi Departemen Hukum Syaiful Rahman di kantornya kemarin.

Surat keputusan Menteri Keuangan dikeluarkan dalam tiga periode, yaitu 28 Juli, 1 Agustus, dan 5 Agustus 2008. Berdasarkan itu, pihak Imigrasi mengeluarkan larangan bepergian ke luar negeri selama enam bulan hingga 27 Januari 2009.

Ada 14 nama dari enam perusahaan yang masuk daftar cekal Imigrasi. Sepuluh di antaranya berasal dari PT Kaltim Prima Coal dan PT Arutmin Indonesia dua perusahaan tambang batu bara milik Grup Bakrie di bawah payung PT Bumi Resources Tbk.

Sisanya, dua perusahaan batu bara lainnya: PT Adaro Indonesia milik Edwin dan PT Berau Coal milik keluarga Risjad. Turut dicekal petinggi dua perusahaan pembia-

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto menyatakan pencekalan dilakukan agar perusahaan-perusahaan itu segera membayar utangnya ke negara. "Kami cekal mereka agar kooperatif dan mau membayar," katanya kepada *Tempo* kemarin. Setelah utang dilunasi, cekal pun akan dicabut.

Adapun total piutang negara dalam bentuk royalti yang harus dibayarkan perusa-

haan-perusahaan itu sekitar Rp 3 triliun. Tagihan itu, kata Hadiyanto, telah dilimpahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara sejak setahun lalu. Tapi hingga kini belum ada tanda-tanda akan dilunasi. "Kalau begitu kan harus me-

ningkat penagihannya ke level yang lebih tinggi," ujarnya. "Lebih memaksa."

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum bisa dimintai keterangan lebih jauh karena sedang di Australia. Namun, dalam pesan pendeknya kepada *Tempo*, ia menjelaskan tunggakan perusahaan batu bara itu merupakan utang royalti. "Sebagai penerimaan negara bukan pajak," katanya.

Ini berarti masalah yang kini dihadapi Kaltim Prima dan Adaro berbeda dengan persoalan pajak yang juga melilitnya bebe-

Tolak Royalti

HALAMAN A2

Pelunasan

HALAMAN A14

rapa waktu lalu. Seperti pernah diberitakan, kedua perusahaan ini juga diminta membayar kekurangan setoran pajak. "Baru Adaro yang sudah membayar," kata sumber di Direktorat Pajak.

Direktur Keuangan Bumi Resources Eddie J. Soebari tak mau mengomentari penckalan atas dirinya. "Saya baru dengar kabar itu" ujarnya. Rosan P. Roeslani, yang dulu komisaris di Kaltim Prima, juga mengaku belum mengetahui putusan itu. Yang jelas, ia mengatakan tak lagi menjabat komisaris di perusahaan itu sejak awal 2007. "Ini jelas salah alamat."

Protes keras dilontarkan bekas Presiden Direktur PT Berau Coal Jeffrey Mulyono, yang mengaku sudah pensiun sejak pertengahan 2005. "Menteri Keuangan bodoh dan sembrono karena tidak mengecek ulang," tuturnya. Karena itu, ia kemarin melayangkan surat protes ke Menteri Keuangan dan Menteri Energi.

HUBUNGAN MASYARAKAT
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 (6) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : |

TAHUN 2008

Sandungan Terbaru Bakrie

Raksasa tambang batu bara milik Grup Bakrie tak pernah sepi dari masalah. Belum usai kisruh penghentian operasi PT Kaltim Prima Coal oleh Bupati Kutai Timur, kini para petinggi perusahaan itu bersama PT Arutmin Indonesia kena cekal pihak Imigrasi—keduanya di bawah payung PT Bumi Resources Tbk.

Tapi Bakrie tak sendiri. Empat perusahaan lainnya, termasuk PT Adaro Indonesia milik Edwin Soeryadjaya, bernasib serupa. Gara-garanya, mereka dianggap lalai membayar tunggakan royalti ke negara. Inilah daftar mereka yang kena cekal:



PT ARUTMIN INDONESIA

1. Kazuya Tanaka (Direktur)
2. Endang Rukhiyat (Direktur)
3. Perry Purbaya Wahyu (Direktur)
4. Eddie Junianto Soebari (Direktur)

Tunggakan royalti: US\$ 75,4 juta.

PT BERAU COAL

Jeffrey Mulyono
(Presiden Direktur)

Piutang:
Rp 312,7 miliar
dan US\$ 26,1 juta

KALTIM PRIMA COAL

1. Nalinkant A. Rathod
(Presiden Komisaris)
2. Abdullah Popo Parulian
(Komisaris)
3. Ari Saptari Hudaya
(Presiden Direktur)
4. Kenneth Patrick Farrel (Direktur)
5. Hanibal S. Anwar (Direktur)
6. Rosan Perkasa Roeslani
(Komisaris)

Tunggakan royalti: US\$ 127,1 juta.

PT ADARO INDONESIA TBK

Edwin Soeryadjaya
(Presiden Komisaris)

Tunggakan royalti:
Rp 144,8 miliar dan
US\$ 93,5 juta.

PT LIBERA UTAMA INTIWOOD

Mualin Kantono
(penjamin pribadi)

CITRADWIPA FINANCE

Hendra Tjoa
(Direktur Utama).

HUBUNGAN MASYARAKAT
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL **AGST** SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 (6) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 1

TAHUN 2008

Sebanyak 14 Direktur Perusahaan Dicekal

JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 14 direktur dari enam perusahaan nasional dicegah pergi ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

Pencegahan itu dilakukan atas permintaan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati karena perusahaan tersebut masih menunggak royalti hasil tambang senilai Rp 3,36 triliun.

Pencekalan itu disebabkan pemimpin dari lima perusahaan tambang tersebut tidak menunjukkan itikad baik dalam melunasi tunggakan royalti.

"Tunggakan royalti itu seharusnya menjadi salah satu sumber penerimaan negara bukan pajak," ujar Menkeu saat dikonfirmasi mengenai pencekalan itu melalui pesan singkat dari Melbourne, Australia, Selasa (5/8).

Mereka yang dicekal adalah jajaran direksi PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Arutmin Indonesia, PT Adaro, PT Berau Coal, PT Libra Utama Intiwood, dan PT Citra Dwipa Finance.

Menurut Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Syaiful Rahman, permohonan pencegahan ke luar negeri dari Menkeu diterima imigrasi pada akhir Juli 2008.

Data Menteri Keuangan menunjukkan, pencekalan terhadap Direktur KPC terkait piutang negara sebesar 127,1 juta dollar AS. Adapun pencekalan terhadap Direktur dan Komisaris Arutmin Indonesia terkait piutang negara sebesar 75,4 juta dollar AS. Sementara utang PT Adaro kepada negara sebesar Rp 144,8 miliar

dan 93,5 juta dollar AS. PT Berau Coal memiliki utang Rp 312 miliar dan 26 juta dollar AS.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan Hadiyanto mengatakan, lembaga yang menangani penagihan royalti batu bara adalah Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Namun, karena sudah berlangsung lama, Departemen ESDM menyerahkan penagihannya kepada Depkeu dan sudah berlangsung sejak setahun lalu.

Menkeu teledor

Di Depkeu, penagihan itu diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Pada tahap awal, PUPN telah menerbitkan penetapan jumlah piutang negara hingga surat paksa, tetapi ke-14 pemimpin perusahaan itu

tetap tak memberikan tanda-tanda akan melunasi tunggakannya.

Jeffrey Mulyono, mantan Presiden Direktur PT Berau Coal, menyatakan bahwa Menkeu telah membuat kesalahan terkait permintaan pencekalan tersebut.

"Pertama, saya sudah pensiun dari posisi Presdir Berau Coal sejak tiga tahun lalu. Kok bisa Menkeu seteledor ini? Kedua, dalam petikan putusan Menkeu itu alasan pencekalan tidak jelas, hanya disebut menimbang dan sebagainya. Menkeu harus membuat permintaan maaf," ujarnya.

Direktur Pembinaan Pertambangan Batu Bara Departemen ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan, persoalan tunggakan royalti itu muncul sejak adanya aturan Pajak Pertambahan Nilai. (VIN/OIN/DOT)

MEREKA YANG DICEKAL

1. PT Kaltim Prima Coal

Ari Saptari Hudaya (Presiden Direktur), Kenneth Patrick Farrel (Direktur KPC), Abdullah Popo Parulian (Komisaris), Rathod Nalinkant Amratlal (Presiden Komisaris), Hanibal ST Anwar (Direktur KPC)

2. PT Arutmin Indonesia

Kazuya Tanaka (Direktur), Endang Ruchiyat (Direktur), Ferry Purbaya Wahyu (Direktur), Edi Junianto Soebari (Direktur)

3. PT Adaro

Edwin Soerjadjaja (Presiden Komisaris)

4. PT Berau Coal

Jeffrey Mulyono (Presiden Direktur)

5. PT Libra Utama Intiwood

Mualin Tantomo sebagai penjamin

6. PT Citra Dwipa Finance

Hendra Tjoa (Direktur Utama)

Sumber: Ditjen Imigrasi

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL **(AGS)** SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 70

TAHUN 200

Depkeu-Depkumham Cekal Bos 5 Perusahaan Tambang

Gayung bersambut. Depkumham menindaklanjuti pencekalan petinggi lima perusahaan tambang yang diminta Menkeu. Pajak Rp 3 triliun diduga belum dibayarkan. Kemungkinan kabur ke luar negeri besar.

MENYAMBUT pencekalan yang dilayangkan Menteri Keuangan (Menkeu) terhadap petinggi lima perusahaan tambang karena belum juga melunasi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp 3 triliun, Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) mencegah lima pengusaha tersebut keluar dari Indonesia.

Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian Depkumham Syaiful Rachman mengatakan, pencegahan itu memang diajukan Departemen Keuangan (Depkeu). Dikatakan Syaiful, para petinggi perusahaan tam-

bang itu antara lain adalah empat direktur PT Arutmin, yaitu Kazuya Tanaka, Endang Ruchjat, Ferry Purbaya Wahyu dan Edy Junianto Sobari. Perusahaan ini diduga berutang kepada negara 75,3 juta dolar AS.

Enam petinggi PT Kaltim Prima Coal juga dicegah. Mereka adalah Keneth Patrick Farrel (Direktur), Perkasa Ruslani (Komisaris), Ari Saptari Hudaya (Presdir), Abdullah Popo Parulian (Komisaris), Rathod Nalimkant Amaratlal (Presiden Komisaris) dan Hanibal S Anwar (Direktur). PT Kaltim Prima Coal diduga terlibat utang piutang dengan negara sebesar 127,1 juta dolar AS.

Ditjen Imigrasi juga mencegah Presdir PT Berau Coal Jeffry Mulyono karena diduga terlibat dalam utang piutang kepada negara sebesar Rp 312,7 miliar dan 26,1 juta dolar AS. Selain itu, Personal Guarantor PT Libra Utama Inti Wood Mualin Kantono dan Dirut PT Citra Dwipa Finance Hendra Tjoa juga kena cegah Ditjen Imigrasi.

Menurut Syaiful, para petinggi

perusahaan pertambangan itu diduga terlibat dalam perkara utang piutang dengan negara sehingga dicegah selama enam bulan. Dasar permohonan pencegahan itu adalah UU No.46/1960 tentang Urusan Piutang Negara dan Kepmenkeu Nomor 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara.

"Piutang ini sudah diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) setahun lebih, namun belum ada tanda-tanda mau membayar, sehingga cara penagihannya harus meningkat ke level yang lebih tinggi, lebih memaksa. Salah satu langkah pengurusan piutang itu adalah dengan melakukan pencegahan. Mereka dimintai tanggung jawab untuk piutang itu," kata Dirjen Kekayaan Negara Departemen Keuangan, Hadiyanto di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, penanggung utang kepada negara itu adalah petinggi lima perusahaan itu yaitu komisaris dan direksinya.

"Menkeu mengajukan cekal selama 6 bulan dan bisa diperpanjang kalau tidak dibayar. Agar

selesai pencekalannya mereka harus mau kooperatif membayar," katanya.

Menurut Hadiyanto, pemerintah tidak mempunyai kepentingan lain dengan pencekalannya itu selain karena menuntut pembayaran utangnya. "Kalau sudah dibayar tak ada kepentingan kita cekal orang. Orang bisa berbisnis dengan tenang. Artinya kalau sebelum enam bulan sudah lunas, cekalnya dicabut. Besok lusa lunas, juga bisa dicabut," katanya.

Di tempat terpisah, Dirjen Pajak Darmin Nasution mengakui jika realisasi penerimaan pajak dari perusahaan-perusahaan tambang batubara memang relatif rendah, yaitu sekitar 15 persen.

"Meskipun perusahaan itu telah berkomitmen membayar tunggakan pajak. Namun, sayangnya pembayaran pajak belum sepenuhnya dilakukan. Kita kasih waktu sampai Desember. Jika tidak juga melunasi, terpaksa penyidik DJP akan memanggil paksa mereka untuk diminta pertanggungjawaban," ungkap Darmin di sela-sela kampanye *sunset policy* di kalangan perbankan nasional di Jakarta, kemarin.

Di tempat terpisah, Jeffrey Mulyono, salah satu nama pengusaha batubara yang dicekal pihak imigrasi menyatakan, pencekalannya terhadap dirinya salah alamat dan berlebihan.

Jeffrey menegaskan, dirinya sudah mengundurkan diri dari Berau Coal sejak 2006 dan kini menjadi konsultan pertambangan.

"Pada 2005 saya mundur sebagai Presdir, lalu 2006 saya sudah pemunduran saya dari Komisaris sudah beres. Jadi kasus saya salah alamat. Tapi karena

Menkeu nggak punya alamat direksi yang baru, yang dicekal Jeffrey Mulyono. Ya marah-lah saya," kata Jeffrey ketika dihubungi wartawan, kemarin.

Ia mengaku sudah mendapatkan surat pencekalannya itu sejak Sabtu (2/8) lalu. Sementara surat klarifikasi sudah dikirimkan kemarin pada pukul 14.00 WIB.

Jeffrey mencoba menjelaskan duduk permasalahan tuduhan tunggakan ini. Menurutnya, masalah bermula saat pemerintah tidak juga mengganti PPN yang dibayarkan perusahaan batubara. Berdasarkan aturannya, PPN yang dibayarkan perusahaan batubara memang diganti pemerintah karena sudah termasuk dalam royalti yang dibayarkan.

"Jadi Depkeu yang punya utang untuk mengembalikan utang ke perusahaan batubara. Karena nggak dibayar-bayar, lalu PKP2B generasi 1 menahan sebagai PPN. Dan proses ini pun susah diajukan ke PTUN, sekarang ada yang sedang banding," katanya.

Karena masih ada proses hukum yang berjalan, yaitu naik banding, menurut Jeffrey harusnya tidak boleh ada tindakan lainnya seperti pencekalannya ini. "Jadi sudah melanggar aturan, salah alamat pula!" geramnya.

Ia pun sudah mengirimkan surat klarifikasi tuduhan dan permintaan pembersihan nama yang dikirimkan ke Dirjen Keuangan Negara, cc Menkeu, cc Menteri ESDM, cc Dirjen Minerbapabum, cc Dirjen Imigrasi dan Berau Coal.

"Saya ingin tuduhan terhadap saya diberesin dulu dan kebebasan saya dikembalikan. Dan saya berharap akan ada permohonan maaf di koran karena sudah menuduh saya," pungkasnya.

■ FIK/CR-6/JPNN

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 71

TAHUN 200

Harga batu bara ICI-4 tak cerminkan pasar

Oleh RUDI ARIFFIANTO
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Harga batu bara kalori rendah yang tercatat dalam Indonesian Coal Index keempat (ICI-4) sebesar US\$40-US\$50 per ton dinilai terlalu tinggi, tidak mencerminkan pasar, dan cenderung terlalu memihak pada produsen.

Seorang eksekutif yang mengetahui tentang proses pembentukan ICI tersebut mengungkapkan terdapat keanehan dalam proses statistik pembentukan harga tersebut. Hal itu tecermin dari deviasi harga

terendah dan tertinggi yang diajukan anggota panel yang mencapai 100%.

"Tapi bagaimanapun bentuk akhir dari ICI-4 yang keluar, kalau dilihat secara statistik jelas ini bisa dipertanyakan kredibilitasnya. Bagaimana mungkin angka terendah dan tertinggi bisa berbeda jauh sekali sampai 100%," katanya kemarin.

ICI-4 merupakan pedoman penentuan harga batu bara berkalori 4.200 kcl yang dibentuk oleh PT Coalindo Energi bekerja sama dengan Argus

Media, perusahaan pengelola indeks yang berbasis di London, Inggris.

Lembaga itu telah membentuk panel dari produsen, konsumen dan pedagang, beranggotakan 25 orang ahli. Kemarin, lembaga itu telah memunculkan rentang harga final ICI-4 antara US\$40 dan US\$50 per ton.

Namun, seorang anggota panel yang tidak bersedia disebutkan namanya menyatakan hanya 20 anggota panel ICI-4 yang telah memberikan harga pada rentang US\$35-US\$70 per ton. Selain itu, dia menye-

butkan harga akhir ICI-4 yang terbentuk pada pekan ini sebenarnya adalah US\$49,65 atau lebih mendekati US\$50 per ton dibandingkan dengan batas bawahnya US\$40 per ton.

Padahal, PLN sebagai pembentuk harga batu bara domestik dalam kontrak-kontrak pembangkit 10.000 MW-nya hanya mematok harga tidak lebih dari Rp300.000 per ton, atau sekitar US\$33 per ton.

Wadirut PLN Rudiantara mengatakan PLN kemungkinan tidak akan menggunakan ICI-4 untuk pedoman harga dalam

transaksi pembelian batu bara pembangkitnya. Pertimbangan itu, katanya, terkait dengan angka akhir yang tidak merepresentasikan harga riil pembelian yang dilakukan PLN.

Managing Director Coalindo Energy Maydin Sipayung mengatakan angka 20 juta ton merupakan harga riil yang terbentuk untuk batu bara yang dikirimkan sejak Januari lalu dan akan berlanjut hingga akhir tahun. Dia mengakui sampai dengan Juli, pengiriman baru mencapai 15 juta ton.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 1

TAHUN 200

13 Eksekutif tambang dicekal

Oleh APRILIAN HERMAWAN
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Pemerintah mencekal 13 petinggi dari lima perusahaan pertambangan, karena menunggak kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak sekitar Rp3 triliun. Pencekalan juga dilakukan terhadap seorang dirut perusahaan pembiayaan.

Dirjen Imigrasi Departemen Hukum dan HAM Syaiful Rahman mengatakan pencekalan itu dilakukan atas permintaan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Tindakan pencegahan ke luar negeri itu didasarkan pada UU Piutang Negara, UU Imigrasi, dan Keputusan Menteri Keuangan No. KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara. "Pencekalan dalam tiga periode dan berlaku hingga enam bulan [Agustus 2008 hingga Januari 2009]," jelasnya, kemarin.

Hadiyanto, Dirjen Kekayaan Negara, Depkeu, menjelaskan pencekalan terhadap para petinggi dari lima perusahaan tambang itu, karena mereka tidak juga melunasi utang perusahaan atas penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sekitar Rp3 triliun. Namun, dia tidak menerangkan kewajiban satu perusahaan pembiayaan yang direktur utamanya ikut masuk dalam daftar cekal.

Menurut Hadiyanto, sudah lama lima perusahaan batu bara itu menunggak PNBP dan hingga kini tidak kunjung melunasinya. Oleh karena itu, pemerintah melalui Ditjen Imigrasi melakukan pencekalan.

Dia menjelaskan masa pencekalan mungkin bisa diperpanjang jika dalam jangka waktu enam bulan yang diberikan, mereka tidak juga melunasi kewajiban tersebut. Hal ini dilakukan untuk mendesak mereka agar bersikap kooperatif dengan me-

manggilan sebagai penanggungjawab kelima perusahaan itu.

"Artinya, kalau sebelum enam bulan sudah lunas, cekal mereka dicabut. Besok-lusa lunas, juga bisa dicabut. Saya yang teken, saya yang janji

Salah alamat

Ketika dihubungi, mantan Presid PT Berau Coal Jeffrey Mulyono mengatakan pencekalan itu salah alamat. Hal ini karena sebagian dari nama-nama yang disebutkan dalam daftar pencekalan sudah tidak menjabat lagi sebagai eksekutif di perusahaan tersebut.

Selain itu, berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara perusahaan batu bara yang umumnya pemegang kontrak perjanjian karya pertambangan batu bara (PKP2B) generasi pertama, sudah memenangi kasus tersebut.

Jeffrey yang juga ketua umum Asosiasi Perusahaan Batu Bara Indonesia menilai Depkeu tidak dibenarkan menghilangkan restitusi pajak PPN yang dikeluarkan perusahaan itu, karena status kontrak yang *lex specialis*.

Dia menegaskan berpedoman pada putusan itu, yang sudah diperkuat dengan *legal opinion* dari Mahkamah Agung, Depkeu justru dinyatakan berutang kepada perusahaan, karena tidak mengembalikan PPN sejak 2001.

Untuk mengompensasinya, perusa-



Sejumlah eksekutif perusahaan tambang yang dicekal

Sejumlah petinggi perusahaan pertambangan dicekal oleh Ditjen Imigrasi terkait dengan kewajiban mereka terhadap negara. Pencegahan diajukan oleh Depkeu melalui permohonan menteri keuangan.

Pimpinan PT Kaltim Prima Coal (KPC)

► Terkait piutang negara US\$127,1 juta

1. Kenneth P. Farrel (Direktur)
2. Rosan Perkasa Ruslaini (Komisaris)
3. Ari Saptari Hudaya (Presiden Direktur)
4. Abdullah Popo Parulian (Komisaris)
5. Nalinkant A. Rathod (Presiden Komisaris)
6. Hannibal S. Anwar (Direktur)



Kenneth P. Farrel



Ari S. Hudaya



Nalinkant Rathod

Pimpinan PT Arutmin Indonesia

► Terkait kasus piutang negara US\$75,4 juta.

1. Kazuya Tanaka (Direktur)
2. Endang Rukhiyat (Direktur)
3. Perry Purbaya Wahyu (Direktur)
4. Edi Junianto Subari (Direktur)



Endang Rukhiyat



Edi J. Subari

Edwin Soeryadjaya. (Preskom PT Adaro)

► Terkait piutang negara Rp144,8 miliar dan US\$ 93,5 juta.

Jeffrey Mulyono

(Presiden Direktur PT Berau Coal)

► Terkait dengan piutang negara Rp 312,7 miliar dan US\$ 26,1 Juta.



Edwin Soeryadjaya



Jeffrey Mulyono

Mualin Kantono

(Personal Guarantor PT Liberal Utama Intiwood)

Hendra Tjoa F

(Direktur Utama Citra Dwipa Finance)

Foto: Bisnis

BISNIS/BUDI PRAKARSA

sebagai bagian dari PNBK kepada pemerintah. "Jadi, jelas pencekalan itu salah alamat dan kami merasa dirugikan sebagai warga negara."

Dirjen Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi, Departemen ESDM, Bambang Setiawan, mengatakan persoalan itu memang terus memancing polemik sejak munculnya PP No. 144/2000. Sebelum PP itu muncul, batu bara merupakan komoditas ke-

na pajak kemudian berubah menjadi komoditas yang tidak terkena pajak.

"Yang tadinya PPN yang dibayarkan direstitusi menjadi tidak direstitusi, sehingga pemegang kontrak generasi pertama yang merasa *lex specialis* tidak mau bayar," ujarnya.

Ketika dimintai komentar atas pencekalan ini, Preskom KPC Nalinkant Rathod menolak memberi penjelasan. "Saya sedang di luar negeri. To-

long hubungi yang lain, saya sedang rapat," ujarnya singkat lalu menutup telepon sebelum *Bisnis* sempat mengajukan pertanyaan lanjutan.

Presdir KPC Ari Saptari Hudaya tidak mengangkat telepon dan menjawab pesan singkat yang dikirimkan ke telepon selulernya. Demikian pula dengan Direktur PT Arutmin Indonesia Edi Junianto Soebari.

Nama Edi, yang pernah menjabat sebagai direktur keuangan PT Bumi Resources Tbk, terakhir kali muncul sebagai direktur Calipso Investment Pte Ltd, kendaraan khusus untuk mengakuisisi perusahaan pertambangan Australia, Herald Resources Ltd.

Kejar kewajiban

Di tempat terpisah, Ditjen Pajak tengah mengejar kewajiban perpajakan satu perusahaan pertambangan batu bara dan 17 perusahaan perkebunan yang hingga kini belum melunasi pembayaran sesuai dengan kesepakatan pemerintah.

Dirjen Pajak Darmin Nasution menjelaskan upaya pemerintah menggenjot penerimaan pajak dari dua sektor *booming*—yang terdiri dari 20 perusahaan—merupakan bagian dari langkah ekstensifikasi pada 2008. Namun, realisasi penarikan pajak kedua sektor itu baru sekitar 15%.

"Dari tiga perusahaan tambang batu bara dan 17 perusahaan perkebunan, total penarikannya masih sedikit, sekitar 15%," jelasnya.

Darmin merinci realisasi penarikan pajak itu berasal dari dua perusahaan tambang yang telah menyerahkan semua kewajibannya, sedangkan satu perusahaan tambang batu bara masih menyicil pembayaran. (*aprilian.hermawan@bisnis.co.id*)

Reportase: 15, 16, DEWI ASTUTI, RUDI ARIFFIANTO, PUDJI LESTARI, ERNA S. U. GIRSANG

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 6

TAHUN 2008

Enam Direksi PT KPC Dicekal

Pencekalan Juga Dilakukan pada Presiden Komisaris PT Adaro

JAKARTA (SINDO)—Dirjen Imigrasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham) mencekal enam direksi perusahaan tambang PT Kaltim Prima Coal (PT KPC).

Pencekalan para direksi PT KPC ini terkait kasus piutang negara sebesar 127,1 juta dolar Singapura.

"Pencekalan itu dilakukan atas permintaan Menteri Keuangan (Menkeu) dalam bentuk tiga periode dan berlaku hingga 6 bulan," kata Direktur Penyidikan dan Penindakan Dirjen Imigrasi Departemen Hukum dan HAM Syaiful Rahman di Kantor Depkumham, Jakarta, kemarin.

Keenam direksi PT KPC itu yakni Direktur PT KPC Kenneth Patrick Farrel, Komisaris KPC Rosan Perkasa Ruslaini, Presiden Direktur KPC Ari Saptari Hudaya, Komisaris KPC Abdullah Popo Parulian, Presiden Komisaris

Rathod Nalinkan Amratlal, dan Direktur KPCHannibal S Anwar.

Menurut Syaiful, pencekalan itu didasarkan pada Undang-Undang Piutang Negara, Undang-Undang Imigrasi, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara. Adapun Nomor Surat Cekal dari Menteri Keuangan adalah SK Menkeu Nomor 41-46 KMVI/2008 yang dimintakan dalam tiga periode, yaitu 28 Juli 2008, 1 Agustus 2008, 5 Agustus 2008.

Surat dari Menteri Keuangan tersebut ditindaklanjuti dengan surat cekal dari Dirjen Imigrasi bernomor Imi.5.GR.02.06-3.20365,

dan Imi.5.GR.02.06-3.20368, dan Imi.5.GR.02.06-3.20369. Tiga periode surat cekal tersebut berlaku hingga 6 bulan ke depan dengan tanggal yang sama, yaitu 27 Januari 2009.

Selain PT KPC, Dirjen Imigrasi Depkumham juga mencekal direksi dua perusahaan tambang dan dua perusahaan pembiayaan. Pencekalan beberapa orang pimpinan perusahaan ini juga terkait kasus piutang negara.

Nama-nama perusahaan itu yakni PT Arutmin Indonesia, PT Adaro, PT Liberal Utama Intiwood, dan PT Citra Dwipa Finance.

Dari PT Arutmin Indonesia, Dirjen Imigrasi mencekal empat direktornya, yakni Kazuya Tanaka, Endang Rukhiyat, Perry Purbaya Wahyu, dan Edi Junianto Subari. Pencekalan itu terkait kasus piutang negara sebesar USD75,4 juta.

Sementara pada PT Adaro, pencekalannya ditujukan pada Presiden Komisaris PT Adaro Edwin Soeryadjaya, karena terkait piutang negara Rp144,8 miliar dan USD93,5 juta, Presiden Direktur Jeffrey Mulyono dari PT Berau Coal juga terkait piutang pada negara Rp312,7 miliar dan USD26,1 juta.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Abubakar Nataprawira saat dihubungi berdasarkan perkembangan hasil investigasi Polda Kaltim—terkait perusahaan tambang yang dinilai bermasalah—, pihaknya mengaku semuanya masih berjalan dan belum ada laporan. "Itu masih berjalan," ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Suswono mendukung langkah Dirjen Imigrasi Depkumham yang mencekal pimpinan beberapa perusahaan tambang. "Saya dukung

langkah itu, sambil menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Pencekalannya memang harus dilakukan. Misalnya pada PT KPC yang sedang bermasalah, itu perlu dan saya dukung," jelas Suswono saat dihubungi tadi malam.

Suswono mengatakan, pencekalannya pada petinggi perusahaan tambang tersebut perlu, apalagi sebelumnya ada dua perusahaan tambang di Kabupaten Kutai Timur yang diberhentikan sementara operasinya, yakni PT Kaltim Prima Coal dan PT Perkasa Inaka Kerta menjadi langkah lanjutan yang konkret.

Dari Samarinda, Bupati Kutai Timur Awang Faroek Ishak mengatakan bahwa pihak kepolisian telah menyita delapan ponton batu bara milik PT KPC pada Minggu lalu. Informasi ini diperoleh Awang dari pihak kepolisian.
(m purwadi)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 2

TAHUN 2008

14 Petinggi Perusahaan Pertambangan Dicekal

Pencekalan diajukan oleh Departemen Keuangan

JAKARTA — Sekitar 14 petinggi perusahaan pertambangan dicegah oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM terkait permasalahan utang piutang antara perusahaan-perusahaan itu dengan negara.

Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian Departemen Hukum dan HAM, Syaiful Rachman, Selasa (5/8), mengatakan, pencekalan itu diajukan oleh Departemen Keuangan melalui permohonan Menteri Keuangan.

Para petinggi perusahaan tambang itu antara lain empat direktur PT Arutmin, yaitu Kazuya Tanaka, Endang Ruchjat, Ferry Purbaya Wahyu, dan Edy Junianto Sobari. PT Atrium diduga berutang kepada negara 75,3 juta dolar AS. Kemudian, enam petinggi PT Kaltim Prima Coal juga dicegah. Mereka adalah Kenneth Patrick Farrel (direktur), Perkasa Ruslani (komisaris), Ari Saptari Hudaya (presdir), Abdullah Popo Parulian (komisaris), Rathod Nalimkant Amaratlal (presiden komisaris), dan Hanibal S Anwar (direktur).

PT Kaltim Prima Coal diduga terlibat utang piutang dengan negara sebesar 127,1 juta dolar AS.

Ditjen Imigrasi juga mencegah Presdir PT Berau Coal, Jeffry Mulyono, karena diduga terlibat dalam utang pi-

utang kepada negara sebesar Rp 312,7 miliar dan 26,1 juta dolar AS.

Selain itu, Ditjen Imigrasi juga mencegah Personal Guarantor PT Libra Utama Inti Wood, Mualin Kantono, dan Dirut PT Citra Dwipa Finance, Hendra Tjoa. Menurut Syaiful Rachman, para petinggi perusahaan pertambangan itu diduga terlibat dalam perkara utang piutang dengan negara sehingga dicegah selama enam bulan. Dasar permohonan pencegahan itu adalah UU Nomor 46 Tahun 1960 tentang Urusan Piutang Negara dan Kepmenkeu No 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara. Ditjen Imigrasi juga mencekal Presiden Komisaris (Preskom) PT Adaro, Edwin Soerjadjaja.

Sementara itu, Dirjen Kekayaan Negara Depkeu, Hadiyanto, mengungkapkan, pencekalan atas 14 pimpinan perusahaan batu bara dilakukan agar perusahaan mau membayar utang ke kas negara. Lima perusahaan batu bara tercatat memiliki utang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 3 triliun.

Hadiyanto menuturkan, yang bertanggung jawab atas piutang tersebut adalah komisaris dan direksi dari perusahaan yang bersangkutan. Mereka adalah yang dimintai tanggung jawab untuk piutang itu. "Karena uangnya piutang PNBP, utang ke kas negara *kok enggak* dibayar. Padahal, kasus ini sudah ditangani Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) selama setahun lebih, tapi tidak ada tanda-tanda mau bayar. Ma-

kanya, kita cekal," kata Hadiyanto, Selasa (5/8).

Ia menjelaskan, utang lima perusahaan negara awalnya diketahui oleh Departemen ESDM. Karena tak membayar, kasus ini kemudian diserahkan ke Menkeu yang mengurus piutang negara.

Pencekalan dilakukan selama enam bulan dan bisa diperpanjang kalau perusahaan tidak juga membayar. Namun, jika sebelum enam bulan mereka mau membayar, pencekalan bisa dicabut. "Kalau sebelum enam bulan sudah lunas, cekalnya dicabut. Kalau lusa lunas, juga bisa dicabut. Saya yang teken, saya yang janji," cetusnya.

Sebelum 2001, perusahaan tambang dikenakan 13 macam pungutan dan pajak. Namun, pada 2001, Ditjen Pajak Depkeu menetapkan bahwa batu bara adalah barang yang tidak kena pajak. Artinya, PPN yang dibayarkan perusahaan mesti direstitusi pemerintah.

Dirjen Pajak kembali menyoroti sektor pertambangan dan batu bara karena hanya sedikit yang mau membayar pajak penuh. "Masih sedikit yang melunasi, tak sampai 15 persen. Padahal, ada yang pajaknya hampir Rp 1 triliun. Ya, *gak* apa-apa, kita beri waktu sampai Desember," kata Dirjen Pajak, Darmin Nasution, Selasa (5/8).

Darmin mengingatkan, bila sampai akhir Desember belum juga melunasi kewajibannya, Ditjen Pajak hanya memberi dua pilihan, dilunasi atau disidik.

■ dri/una/rto

